

SEKTOR JASA KEUANGAN TETAP RESILIEN DI TENGAH BERLANJUTNYA DIVERGENSI PEMULIHAN PEREKONOMIAN DUNIA

“Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dan resilien didukung oleh permodalan yang solid dan likuiditas yang memadai”



Perkembangan perekonomian global masih menunjukkan divergensi pemulihan.



Inflasi Eropa masih persisten tinggi.



IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan perekonomian global di 2023 menjadi 2,7 persen.



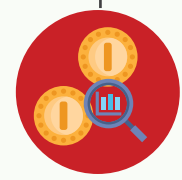
Kinerja perekonomian nasional terpantau positif terutama pada dunia usaha:

- Surplus neraca perdagangan meningkat;
- PMI Manufaktur meningkat di Juli 2023 menjadi 53,3 (Juni 2023: 52,5);
- Utilitas kapasitas industri meningkat.

Global



Pertumbuhan ekonomi AS jauh lebih baik dari ekspektasi.



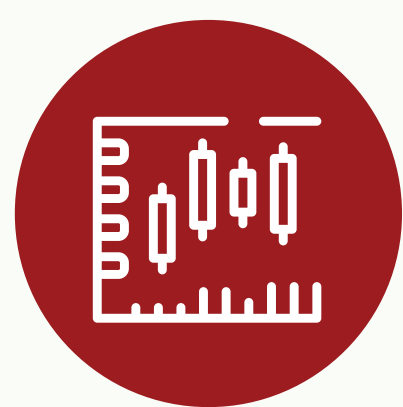
Deflasi mulai terlihat di Tiongkok.

Domestik



Potensi peningkatan kinerja sektor rumah tangga dan sisi permintaan secara umum masih perlu didorong.

Pasar Modal

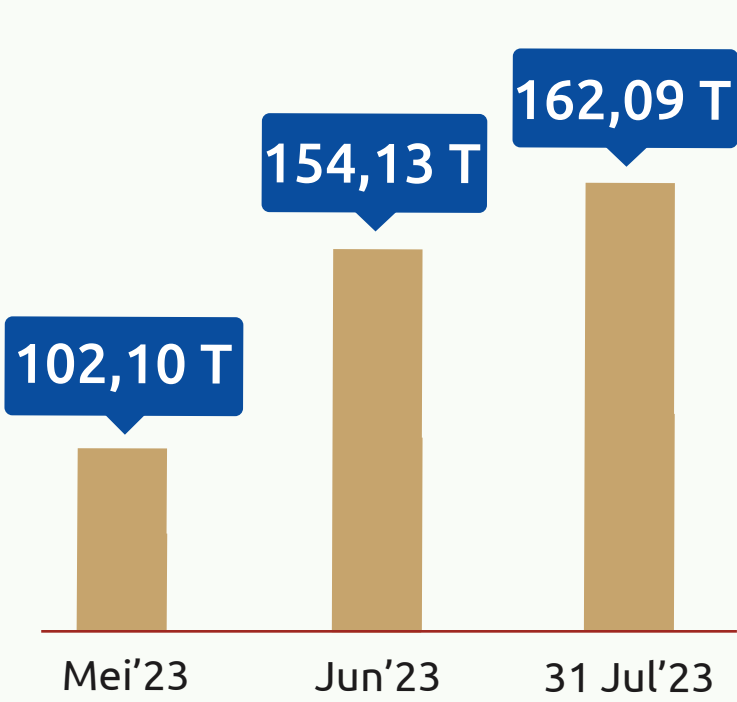


IHSI
6.931,36
31 Juli 2023

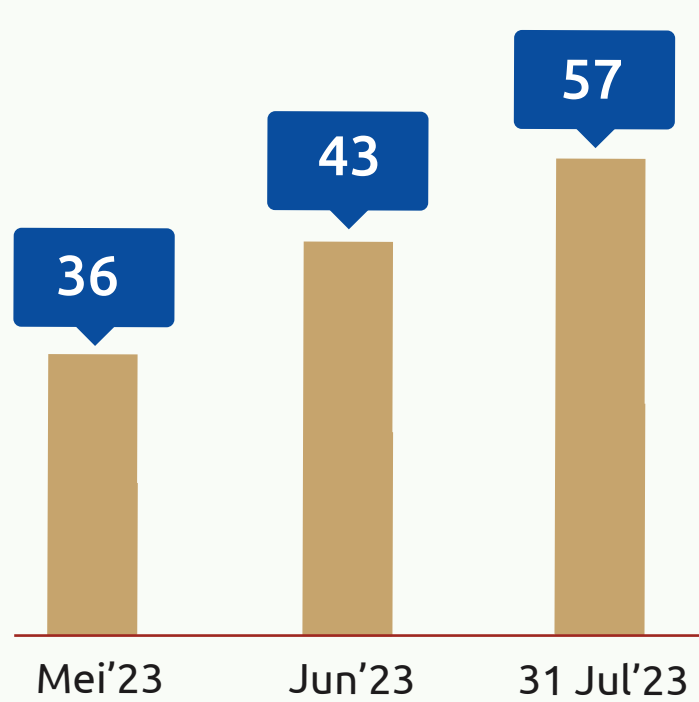


Jumlah Investor
11,42 Juta
31 Juli 2023

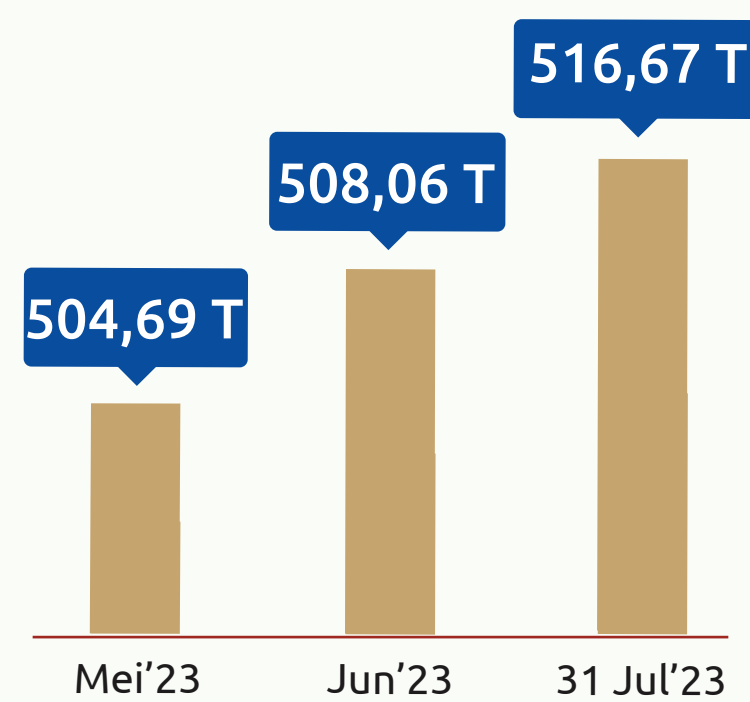
Nilai Penghimpunan Dana



Emiten Baru



NAB Reksa Dana



Securities Crowdfunding (SCF)

16 penyelenggara berizin OJK

429 penerbit



Rp910 miliar total dana yang dihimpun

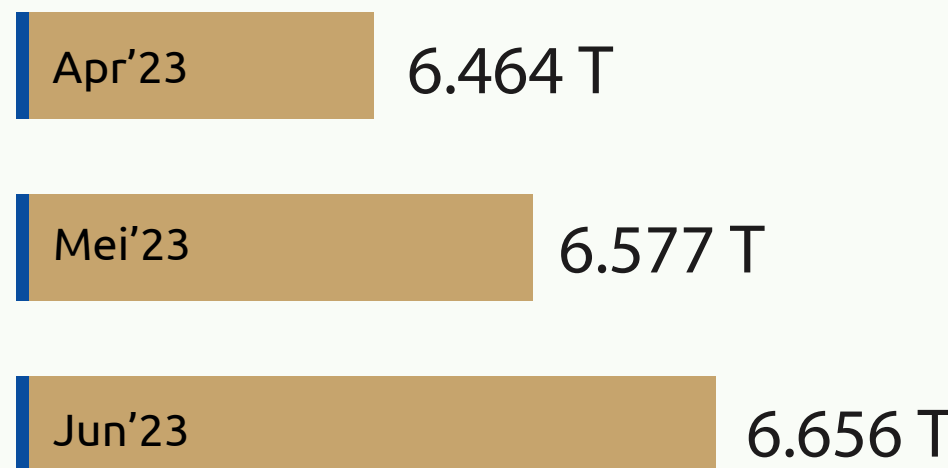
156.916 pemodal

31 Juli 2023

Perbankan

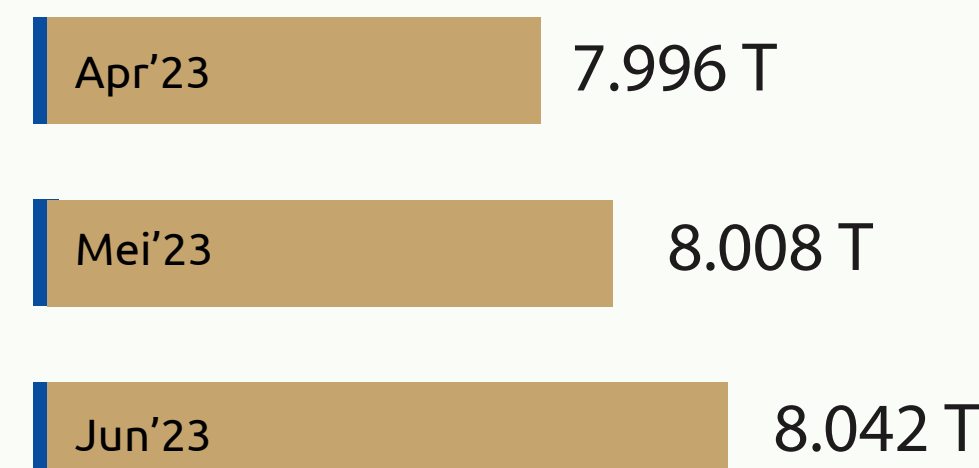
Kredit Perbankan

7,76% yoy



Dana Pihak Ketiga

5,79% yoy



Kredit Investasi

9,60% yoy



Kredit Modal Kerja

5,96% yoy

Kredit Konsumsi

9,03% yoy

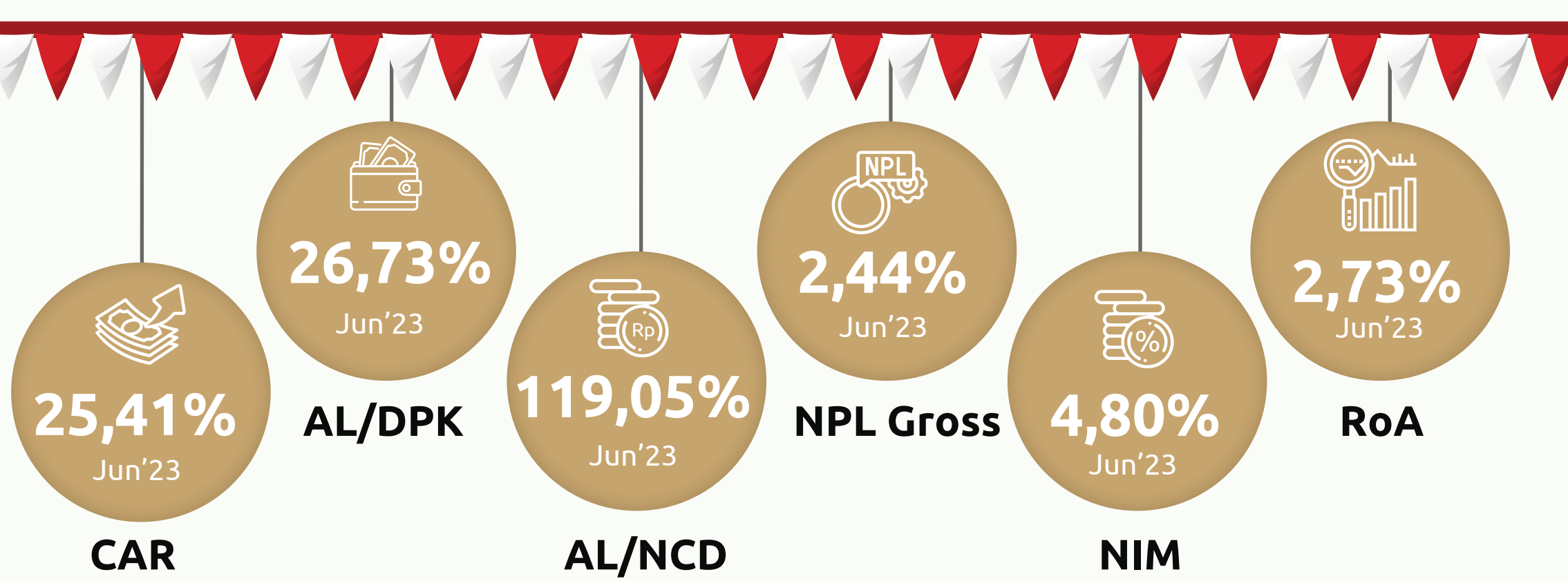
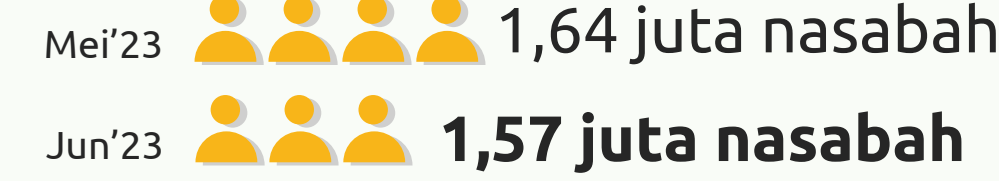


Kredit restrukturisasi Covid-19 terus menurun

Nominal Kredit



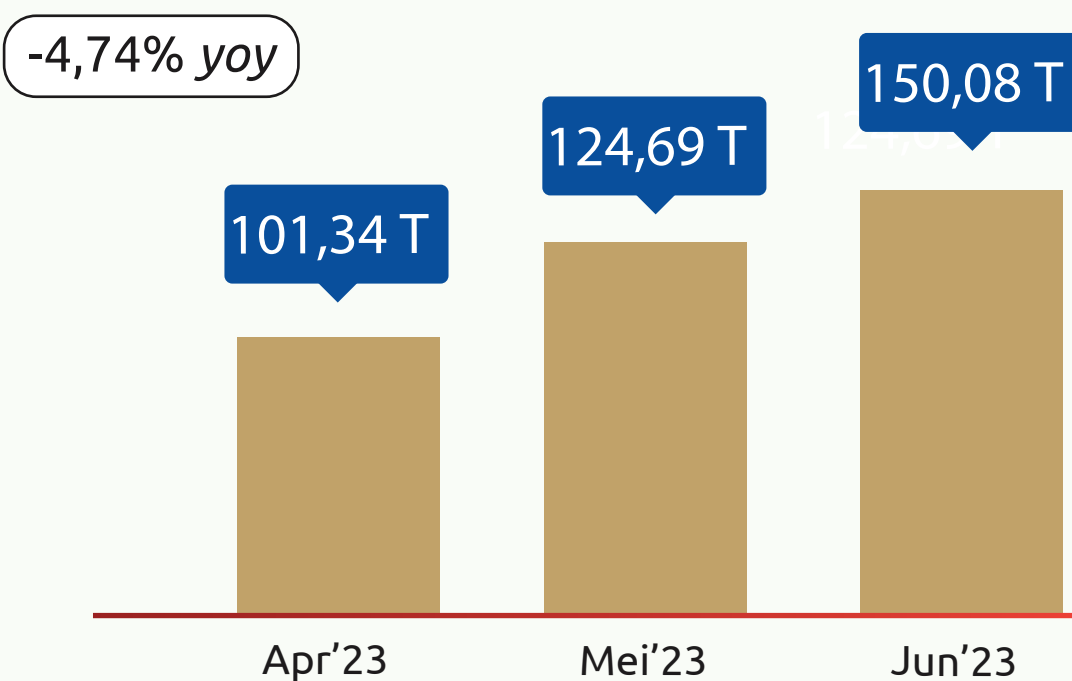
Jumlah Debitur



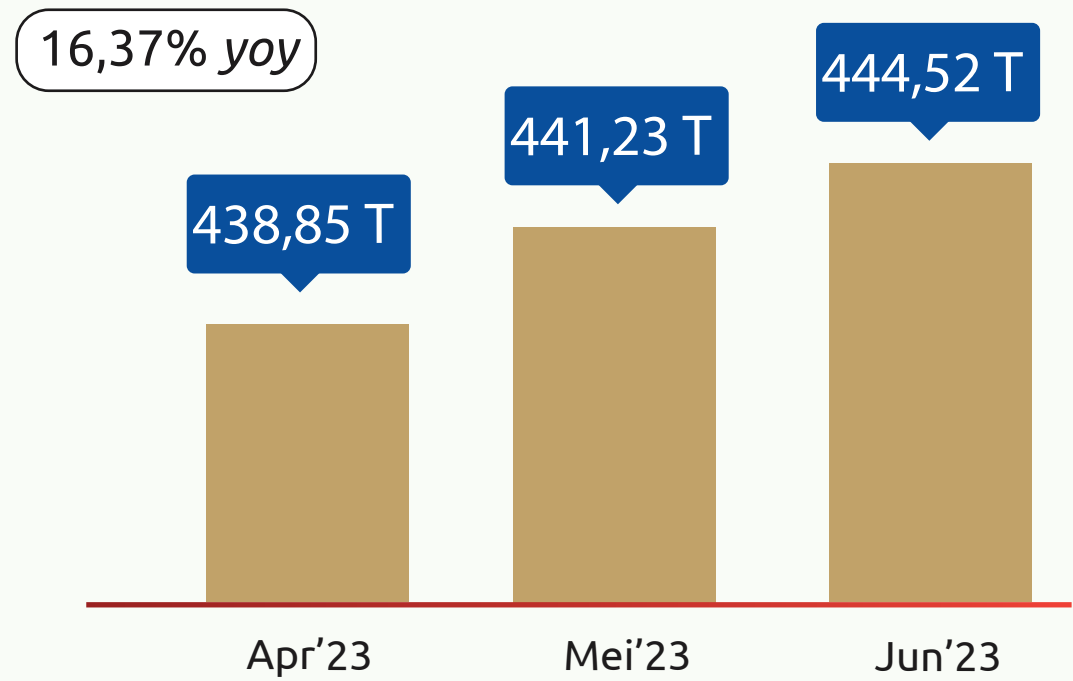
Siaran Pers OJK Nomor SP 86/GKPB/OJK/VIII/2023

IKNB

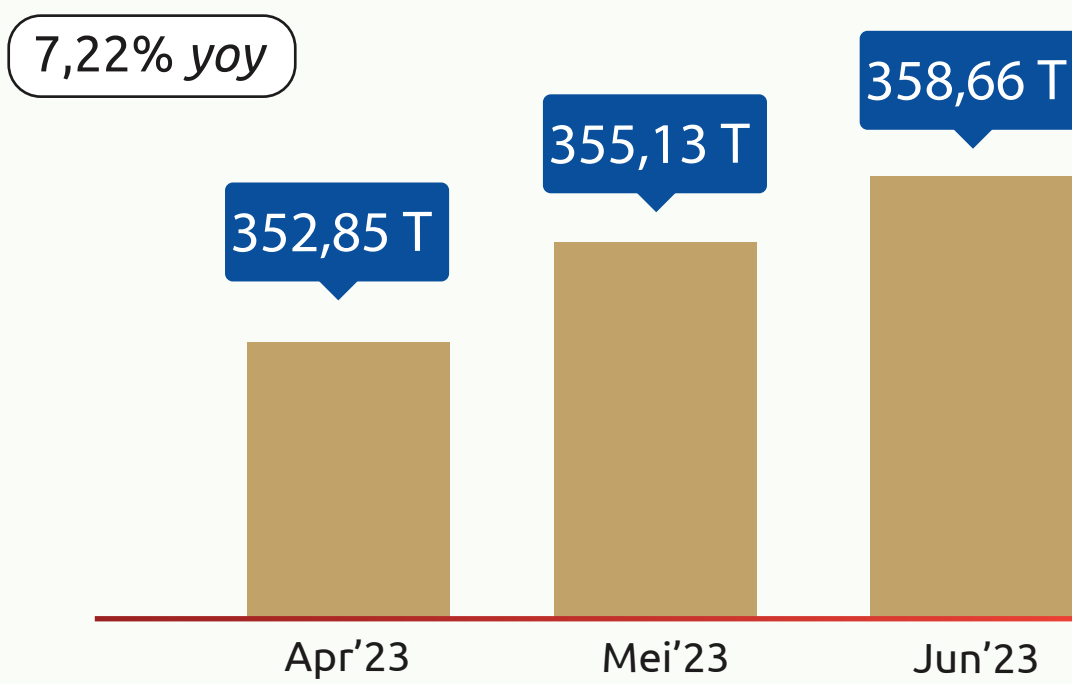
Pendapatan Premi Asuransi



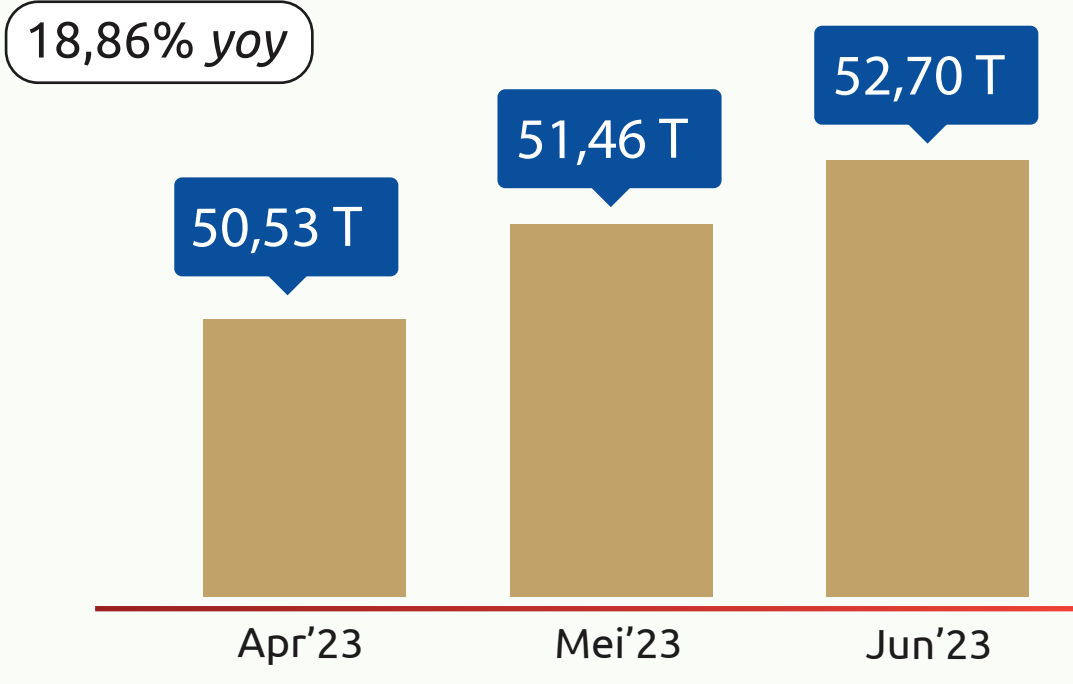
Piutang Pembiayaan



Aset Dana Pensiun



Fintech P2P Lending



RBC Asuransi Umum

314,08%
Jun'23

RBC Asuransi Jiwa

467,85%
Jun'23

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan

2,27x
Jun'23

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross)

2,67%
Jun'23

TWP 90 Fintech P2P Lending

3,29%
Jun'23

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

169.601 layanan
(Januari s.d 31 Juli 2023)

36 pengaduan berindikasi pelanggaran

1.187 sengketa masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

12.175 pengaduan



Selesai oleh *Internal Dispute Resolution* 81,77%; Dalam Proses 18,23%

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satuan Tugas Waspada Investasi/SWI)

6.894 entitas keuangan ilegal dihentikan

5.450

1.193

Investasi Ilegal

251

251

Gadai Ilegal

Data 2017 s.d 31 Juli 2023

Program literasi dan edukasi keuangan

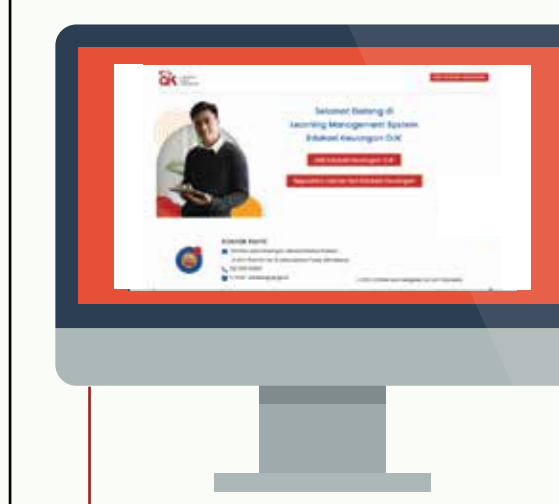
Kegiatan Edukasi

- 1.275 kegiatan
- 329.525 peserta



s.d 31 Juli 2023

LMSKU OJK



s.d 31 Juli 2023

Sikapi Uangmu

- 249 konten Edukasi
- 1.217.485 Penonton



s.d 31 Juli 2023

- 23.650** kali akses modul
- 18.233** sertifikat kelulusan modul



SATU REKENING SATU PELAJAR

per 30 Juni 2023

29,13 triliun nominal simpanan

52,73 juta rekening pelajar

430 bank berpartisipasi



SIMPON MAHASISWA & PEMUDA

per 30 Juni 2023

3,93 triliun nominal simpanan

921.031 rekening pelajar

Arah Kebijakan OJK

OJK mengambil langkah kebijakan yang terukur agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan sektor jasa keuangan dapat menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- Mengedepankan keseimbangan antara optimalisasi potensi pertumbuhan dengan upaya menjaga profil risiko LJK, terkait penyesuaian Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
- Mendukung implementasi PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor.
- Akan menerbitkan peraturan yang akan menjadi payung hukum terkait penanganan kondisi Pasar Modal yang berfluktuasi secara signifikan dan dapat diaktifkan sewaktu-waktu ketika kondisi fluktuasi signifikan terjadi.
- Memonitor dan akan mengkaji lebih lanjut perkembangan rasio klaim dan normalisasi pertumbuhan premi asuransi jiwa terutama untuk lini usaha PAYDI.

Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan Infrastruktur Pasar

- Sebagai tindak lanjut mandat UU P2SK, OJK menerbitkan penyempurnaan POJK terkait pemisahan Unit Usaha Syariah baik untuk perbankan, perusahaan asuransi dan reasuransi, serta perusahaan penjaminan; dan POJK tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- Menerbitkan POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) untuk semakin memperkuat integritas laporan keuangan industri jasa keuangan dengan meningkatkan peran manajemen dan akuntan publik.
- Sedang menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- Menjalankan *enforcement* atas regulasi terkait kepemilikan aktuaris perusahaan pada perusahaan asuransi dan reasuransi, sebagaimana diamanatkan dalam UU Perasuransian dan POJK.
- Menjalin kerja sama dengan World Bank dalam rangka *benchmarking* untuk meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan dana pensiun agar sejalan dengan standar internasional dan *best practices*.

Penguatan Tata Kelola OJK

- Menyempurnakan pedoman, penguatan kompetensi dan simulasi bencana untuk memastikan resiliensi proses bisnis dan tugas OJK kepada *stakeholders* melalui rangkaian manajemen kelangsungan bisnis.
- Berkoordinasi dengan pemerintah sebagai Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) dan *stakeholders* dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Rencana Kerja dan Anggaran OJK.
- Pengembangan dan penguatan fungsi audit khusus dalam penerapan manajemen *anti-fraud* dan penegakan integritas internal OJK sesuai standar dan praktik-praktik terbaik.
- Berkolaborasi dengan BPK RI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Praktisi di Bidang GRC dalam rangka mendukung transformasi OJK.
- Penguatan pengelolaan risiko dan pengendalian internal.
- Penguatan kompetensi pada fungsi pemeriksaan khusus dan investigasi, baik di bidang pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) dan internal OJK.

Kebijakan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen

- Memperluas adopsi *Generic Model* Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI) di Wilayah Perdesaan.
- Memperkuat kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan segmen masyarakat rentan lainnya.
- Mengakselerasi penyelesaian penyusunan ketentuan teknis mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satuan Tugas Waspada Investasi/SWI) telah melaksanakan koordinasi secara intensif dan berkala dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menekan beredarnya informasi online (link, situs) dan aplikasi terkait pinjaman online ilegal dan investasi ilegal yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
- Memperkuat pemantauan pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melakukan pengisian Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pemenuhan Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kebijakan Penanganan LJK Dalam Perhatian Khusus

- Penyidik OJK telah menyelesaikan total 108 perkara (83 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB)
- 89 perkara telah diputus oleh pengadilan (71 perkara *in kracht*, 2 perkara proses banding, dan 16 perkara tahap kasasi)

Data 2014 s.d 2023

Dengan langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional paska pandemi.